



KASUS ASABRI

Panggil Sri Mulyani dan Erick Thohir

JAKARTA - Belum selesai kasus PT Asuransi Jiwasraya, penegak hukum kini harus bersiap menangani kasus yang tak kalah besar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan ada informasi korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asab. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menangani kasus



Mahfud MD

tersebut.

Sebelumnya, Mahfud MD mengakui, dirinya sudah mendapat kabar terkait masalah di Asabri. "Yang itu mungkin tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya," ungkap Mahfud. Dia mengakui, ketika masih menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan) sempat terjadi korupsi di Asabri.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



Panggil Sri Mulyani dan Erick Thohir

Sambungan dari halaman 1

Para pelaku sudah diadili. Karena itu, dia merasa heran mengapa dugaan korupsi kembali muncul di Asabri.

Untuk itu, Mahfud menyatakan akan memanggil menteri keuangan (menkeu) dan menteri BUMN untuk mengetahui masalah yang tengah membelit Asabri. "Karena milik negara Asabri itu, dan jumlahnya besar, maka dalam waktu tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana negara dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," bebernya. Dia menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh toleran terhadap kejahatan korupsi.

Apalagi, kata dia, Asabri bertalian langsung dengan prajurit dan anggota Polri yang setiap hari bekerja di lapangan. "Tidak boleh berkorupsi untuk orang-orang kecil, untuk prajurit, tentara, yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat (tinggal) lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," tegas Mahfud. Dia memastikan, bila ada indikasi pelanggaran hukum dalam masalah yang membelit Asabri. Pihaknya langsung menyerahkan kepada penegak hukum. "Dan supaya diungkap ya," tambahnya.

KPK sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi diharapkan menangani kasus ini. Lembaga antirasuah itu menyatakan siap jika ada permintaan pengusutan, dilengkapi dengan data-data dan informasi yang cukup

untuk membuka dugaan korupsi tersebut. "Kami rencana akan mengumpulkan info dan meminta data kepada Pak Mahfud," ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kemarin.

Hingga kemarin, Ghufron menyatakan belum ada data apa pun yang bisa menjadi titik awal memulai pengungkapan kasus tersebut. Rencana, KPK juga akan menemui Mahfud secepatnya di hari kerja. "Kemungkinan minggu depan, kalau sudah hari kerja. Sampai saat ini Pak Mahfud belum pernah berkomunikasi dengan KPK," lanjutnya.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kasus itu juga bisa ditangani instansi penegak hukum lain, misalnya Kejaksaan Agung yang saat ini menggarap kasus Jiwasraya. Yang terpenting, lanjut dia, kasus tersebut bisa segera terungkap dan tidak terpaku pada satu penegak hukum saja.

Melihat angka yang cukup besar, kasus ini berpotensi menjadi megakorupsi. Namun, Ghufron menyebut tidak ada ukuran pasti waktu maksimal yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus besar seperti ini. "Peristiwanya seperti apa belum bisa terbayang. Jadi berapa lamanya (mulai penyelidikan awal sampai penetapan tersangka) juga tidak pasti," paparnya.

Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir segera memanggil Direktur Keuangan dan Investasi PT Asabri (Persero) Rony Hanityo Apriyanto Jumat (10/1). Terkait pemanggilan tersebut, Erick

belum bersedia bicara banyak. Dia hanya menegaskan bahwa pihaknya menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Asabri.

"Kan gini, BPK sudah mengeluarkan audit Jiwasraya. Asabri saya belum dapat audit BPK-nya. Kita tunggu aja. Saya belum siap bicara soal Asabri sebab saya belum tahu," paparnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, menambahkan bahwa pemanggilan tersebut terkait dengan pemaparan umum terkait kinerja Asabri. Dia juga memastikan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir siap memberitahukan kondisi keseluruhan Asabri pada Mahfud MD. "Nanti Pak Erick akan melaporkan ke Pak Mahfud," tambahnya.

PT Asabri adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI. Berdasarkan laporan keuangan pada laman perseroan, laporan kinerja terakhir adalah tahun 2017. Laporan tersebut menyebutkan, aset yang dimiliki Asabri mengalami kenaikan dari yang semula Rp 36,5 triliun pada 2016, menjadi Rp 44,8 triliun setahun kemudian. Sementara dari sisi laba, pada 2017, laba bersih perseroan pada tahun berjalan adalah sebesar Rp 943,8 miliar. Jumlah laba bersih ini juga meningkat drastic dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 116,4 miliar. *(syn/deb/ken)*